

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, K., & Agustina, R. (2020). Perlakuan Akuntansi Piutang Air pada PDAM di Jombang (Studi Kasus PDAM Tirta Kencana Kabupaten Jombang). *Journal of Finance and Accounting Studies (JFAS)*, 2(2), 115–125.
- Ariyasa Qadr, R., Haniyah, R., & Asqolani. (2020). PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGELOLAAN PERPAJAKAN PADA UNIT PENYEDIA AIR BERSIH KOTA BEKASI. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, 4–5. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30656/jpmwp.v4i1.1902> Penyedia
- Bayu Firdaus, A., & Marfiana, A. (2021). Penerapan *Prepopulated* Data Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan Kesesuaiannya Dengan Peraturan PPN. *Educoretax*, 1(3), 219–229. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.33>
- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak* (C. Muzamin (Ed.)). Genesis Learning.
- Darussalam, Septriadi, D., & Armaya Dhora, K. (2018). *KONSEP DAN STUDI KOMPARASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI* (Darussalam (Ed.); 1st ed.). DDTC .
- Esanawati, R. (2009). *Analisis ekonomi fungsi produksi, penetapan tarif dan alokasi air minum yang efisien studi kasus : PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/14166>
- Haniyah, R., & Asqolani. (2020). PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK MASUKAN PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PPN DAN YANG DIBEBAHKAN (STUDI PADA PDAM TIRTA PATRIOT). *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 3, 62–63.
- Lim, S. A., & Indrawati, L. (2014). PENERAPAN METODE PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI INDONESIA. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 6(2), 116–118.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Penerbit ANDI.
- Musyzifah, W., & Shofia, L. (2020). *Mekanisme Akuntansi Pendapatan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Jombang* (Issue February, pp. 1–21).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum*. (2006).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan*

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. (2021)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.O11/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak. (2014)

Puspita Sari, A., Citrawati, Y., & Novitasari, P. (2019). *LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM) MEKANISME PENENTUAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JOMBANG.*

Safitra, D. A., & Swasito, A. P. (2020). *Perpajakan 2* (H. Muamarah (Ed.)). Unit Penerbitan PKN STAN.

Syach Ginting, M. E., & Wijaya, S. (2018). *PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENYERAHAN AIR BERSIH : DIBEBASKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT?*

Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 185–201. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5017>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. (2004)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2009)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007)